

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Chomzah, Ali Ahmad. *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia (Jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Gunanegara. *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa, 2017.
- . *Mengenal Hukum Agraria dan Real Estate Law*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2018.
- . *Pendapat Hukum Bangunan, Fungsi, dan Penerapan dan Contoh Pendapat Hakim Pada Tindak Pidana Agraria*. Jakarta: PT Tatanusa, 2019.
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- . *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Cet. XI)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamidi, Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- . *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- . *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jilid I, Edisi Revisi, Cet. XI)*. Jakarta: Djambatan, 2007.

- Hutagalung, Arie Sukanti. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: LPHI, 2005.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- H.S., H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Indroharto. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika, 1998
- . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nugraha, Safri. *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: BPHN, 2007.
- Parlindungan, A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: CV Mandar Maju, 1992.
- Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto. *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Pratiwi, Cekli S. dkk. *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rachman, Noer Fauzi. *Land Reform dari Masa ke Masa Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2011.
- Salim, M. Nazir dkk. *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965*. Yogyakarta: STPN Press dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM-STPN), 2014.

Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Sidharta, Arief. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Aditya Bakti, 1995.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implentasi (Cet. IV)*. Jakarta: Kompas, 2006.

Tehupeiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Wiranata, I Gede A.B. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Jurnal

Aditama, Purna Noor. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli". *Lex Renaissance Vol. 3 No. 1*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Bakri, Muhammad. "Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)". *Kertha Patrika Vol. XXXIII, No.1*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008.

Hamler. "Penegakan Hukum Tanah". *Nagari Law Review Vol. 1 No. 2*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018.

Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)". *Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol. 19, No. 1*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2014.

Komaling, Ester Anastasiya. "Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Rangka Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006". *Lex Privatum Vol. VII/No. 4*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019.

Mahniasari, Indah. "Pendaftaran Tanah Adat". *Al' Adl Vol. V No. 9*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2013.

- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review Vol. V No. 3*. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus Vol. XIV No.1*. Padang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, 2015.
- Rizqi, Andina Alfia dan Yusriyadi. "Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya", *Notarius Vol. 11 No. 2*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- Sari, Devina Puspita. "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata", *Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2019.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal Vol. 2, Issue 3*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.
- Widjiastuti, Agustin. "Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN", *Perspektif Vol. 22 No. 2*, Medan: Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area, 2017.
- Zakie, Mukmin. "Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda", *Legality, Vol. 24 No.1*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

Disertasi

- Marbun, SF. 2001. "Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia". *Disertasi*. Universitas Padjajaran Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2403).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan

Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 284/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 576/PDT/2017/PT DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1393 K/PDT/2019.

Website / Internet

Astutik, Yuni. “BPN: dari 9.000 Laporan Agraria, 50% Terkait Mafia Tanah”.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121194756-4-131734/bpn-dari-9000-laporan-agraria-50-terkait-mafia-tanah> (diakses 29 September 2020).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. “Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata”.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html#:~:text=Dasar%20hukumnya%20adalah%20UU%20No,UU%20No%2020%2F1947>. (diakses 18 April 2021).

Direktorat Jenderal Tata Ruang. “Sejarah Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)”.
<https://tataruang.atrbpn.go.id/Posts/Index/1> (diakses 04 April 2021).

Hasanah, Sovia. “Perbedaan Peralihan dengan Pembebanan Hak Atas Tanah”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca1b2fbf3102/perbedaan-peralihan-dengan-pembebanan-hak-atas-tanah/> (diakses 05 April 2021).

Heryantoro. “Pentingnya Status Tanah Clear and Clean untuk Penilaian Real Property Dalam Rangka Pemindahtanganan”.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/10264/Pentingnya-Status-Tanah-Clear-and-Clean-untuk-Penilaian-Real-Property-Dalam-Rangka-Pemindahtanganan.html> (diakses 04 April 2021).

Hidayat, Arief. “Indonesia adalah Negara *Religious Welfare State*”.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16022> (diakses 02 April 2021).

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. “Sejarah Konteks Kelahiran Pendidikan Agraria”. <https://stpn.ac.id/profil/sejarah> (diakses 04 April 2021).

Surayya. “Analisis Kasus”. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131085-T%2027396-Analisis%20Kasus-Analisis.pdf> (diakses 12 Oktober 2020).

Suryowati, Estu. “659 Konflik Agraria Tercatat Sepanjang 2017, Mencakup Lebih dari 500.000 Hektar”. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agraria-tercatat-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000> (diakses 29 Desember 2020).

Trisnawati, Septina. “BPN Pastikan Hanya Melayani Pensertifikatan Tanah yang *Clean and Clear*”. https://rri.co.id/palangkaraya/daerah/1002044/bpn-pastikan-hanya-melayani-pensertifikatan-tanah-yang-clean-and-clear?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign (diakses 05 April 2021).

